

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR NO 2 TAHUN 2013 TENTANG
BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA
(Studi di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk di Ujikan dalam Sidang Munaqasah Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

PERMATA SEPTA RIA

NPM.1521020155



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1441H/2019M

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR NO 2 TAHUN 2013 TENTANG
BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA
(Studi di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk di Ujikan dalam Sidang Munaqasah Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

PERMATA SEPTA RIA

NPM.1521020155

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing 1 : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing 2 : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1441H/2019M

ABSTRAK

Mayoritas penduduk Ogan Komering Ulu Timur yang berprofesi sebagai petani menjadi salah satu faktor bagi masyarakat Ogan Komering Ulu Timur tidak mengerti hukum dan tidak menyadari hak-hak mereka sebagai subjek hukum. Dalam hal ini menjadikan mayoritas masyarakat memiliki ketakutan tersendiri terhadap hukum. Saat terjadi permasalahan hukum masyarakat cenderung tidak paham bagaimana proses dalam penyelesaian masalah tersebut melalui jalur hukum. Selain itu masyarakat juga sering kali merasa segan untuk memakai jasa advokat karena pemahaman yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa biaya untuk menggunakan jasa advokat itu tidak terjangkau.

Rumusan masalah (1) penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan dari Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 mengenai bantuan hukum cuma-cuma di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No. 2 Tahun 2013 mengenai bantuan Hukum cuma-cuma?

Tujuan penelitian ini dilakukan (1) Untuk mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No. 2 Tahun 2013 mengenai bantuan hukum cuma-cuma di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan juga (2) untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No. 2 Tahun 2013 mengenai Bantuan Hukum Cuma-cuma. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang sifatnya deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang jelas mengenai situasi yang terjadi kemudian dianalisis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan Implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin kabupaten Ogan Komering Ulu Timur belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya (1). belum adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bantuan hukum secara gratis sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya program bantuan hukum tersebut, (2). minimnya anggaran yang disediakan untuk program bantuan hukum sehingga tidak dapat mengcover seluruh perkara yang memerlukan bantuan hukum, (3) adanya pembatasan pelayanan dengan adanya perkara-perkara tertentu yang tidak bisa diberikan bantuan hukum (4) Minimnya lembaga bantuan hukum serta jauhnya akses menempuh lembaga bantuan hukum sehingga tidak efektif untuk masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif dalam pembahasan mengenai bantuan hukum ini tidak terlepas dari asas keadilan dan persamaan yang seharusnya didapatkan oleh semua orang yang berhak. Namun yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan dari peraturan daerah Ogan Komering Ulu Timur mengenai bantuan hukum Cuma-Cuma yang diberikan kepada orang tidak mampu tidak sesuai dengan asas keadilan dan persamaan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : Permata Septa Ria

NPM : 1521020155

Jurusan : Siyasah Syar'iiyah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERARTURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NO 2 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA (Studi di Kota Martapura Kabupaten OKU Timur)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag.

NIP. 197411062000031002

Pembimbing II

Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

NIP. 195704031987031003

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah

Dr. H. Nurnazli, SH, S.Ag.M.H.

NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NO 2 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA** (Studi di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur) disusun oleh, Permata Septa Ria, Npm: 1521020155 Program studi Siyasah Syar'iyah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 November 2019

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji Utama : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr.H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. H. Khoirul Abror, M.H. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. Kholidin, M.H.
IP. 196610221993031002



MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

...“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”. (QS: Al-Maidah[5]:2)



PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Saipul Anwar dan Ibu tercinta Kasmawati, terima kasih atas setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbakan untukku, terima kasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terima kasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terima kasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terima kasih banyak kalian orang tuaku yang terbaik dalam hidupku.
2. Adikku tercinta Rifki Anjaya Putra dan Noufal Ghaisan Asfar, terimakasih atas segala do'a dukungan dan kasih sayang.
3. Seluruh keluarga dan saudaraku yang telah mendukung dan mendo'akan saya.
4. Alamamater tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Permata Septa Ria putri pertama dari pasangan Bapak Saipul Anwar dan Ibu Kasmawati lahir di Lubuk Leban, Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten OKU pada tanggal 24 September 1996. Mempunyai saudara kandung yaitu dua adik laki-laki yang bernama Rifki Anjaya Putra dan Noufal Ghaisan Asfar.

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh:

1. Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Bumi Dipasena Makmur pada tahun 2000 dan selesai tahun 2002.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Bumi Dipasena Makmur pada tahun 2002 dan selesai tahun 2008.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Rawajitu Timur pada tahun 2008 dan selesai tahun 2011.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 05 OKU pada tahun 2011 dan selesai tahun 2014.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan lampung, mengambil program studi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) pada Fakultas Syari'ah Pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Implementasi PERDA OKU Timur No 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Studi di Kota Martapura Kabupaten OKU Timur)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada proram strata (S1) Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Dr. H. Nurnazli, SH, S.Ag.M.H selaku Ketua Jurusan Siyasah dan Frenki, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Jayusman, M.Ag. selaku pembimbing I dan Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk

membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
6. Guru-guruku tercinta dari Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkan ku banyak hal sehingga dapat membaca dan menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk dalam diperguruan tinggi ini.
7. Kedua Orang Tuaku Bapak Saipul Anwar dan Ibu Kasmawati. Yang memberikan dukungan secara moril maupun materil.
8. Kedua adikku Rifki dan Noufal yang selalu memberikan dukungan.
9. Keluarga Besar Anidar, Alm. Akas, embai, uwak, Pakcik, Mamang, cak, kiyai yang selalu memberi semangat dan dukungan.
10. Keluarga Besar Baker, Bakas, Kajut, Awai, Bungsak, Bungah, Buncek, Makcek, kak Wonsen, Nisa, Ketrin, Dwi, Nia, Winda, Nabila, Putri, Aisah, Nayla, Farza, Abid, Fatir. Om Diki, Cik Jenny yang selalu memberi Semangat dan Dukungan .
11. Sahabat-sahabat saya mba Min, Ela, Delva, Misra, Mae, Okti, Retno, Dede, Een, Kadek, Andre, Eko, Yang Telah Membantu Dan Selalu Ada Disaat saya membutuhkan.

12. Teman-Teman Siyasah C yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
13. Teman KKN Kelompok 48 Aisah, Indri, Lupi, Peti, Rizka, Kak Mala, Dyah, Shela, Hakim, Fiqri, Rizki, Audi, Dan Rio. Keluarga Bapak Suhardi, Ayah, Bunda, Mas Cipta, Riris, Zulfa dan Warga desa Mekar Jaya.
14. Teman seperjuangan PPS di PA Kalianda Gelombang 3.
15. Rekan-rekan mahasiswa
16. Team kost A&G kawan kost terbaik mbk Novi, mbk Dina, Tuti, Desi, , dan Sabta pokoknya semuanya maaf yang gak bisa disebutkan satu persatu.
17. Keluarga besar Wannaone dan AB6IX yang selalu menghibur saya. terutama adek Ujin yang lucu.
18. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun saya terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 5 September 2019

Permata Septa Ria

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Masalah	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikan Masalah	9
H. Metode Penelitian	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Bantuan Hukum Menurut Hukum Positif	13
1. Sejarah Bantuan Hukum	13
2. Pengertian Bantuan Hukum	21
3. Dasar hukum	25
4. Asas asas pemberian bantuan hukum	28
5. Pihak-Pihak Pemberi Bantuan Hukum.....	31
6. Syarat Pemberi Bantuan Hukum	34
7. Syarat Penerima Bantuan Hukum	34
8. Jenis Layanan Bantuan Hukum.....	35
B. Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam	37
1. Dasar Hukum	40
2. Advokat	43
3. Syarat pemberi bantuan hukum.....	48
4. syarat penerima bantuan hukum.....	48
5. Syarat perkara yang akan dikuasakan	49
6. Akibat Hukum Akad Al-Wakalah.....	50
7. Berakhirnya Akad Al wakalah	50
C. Tinjauan Pustaka.....	52

BAB III DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	54
1. Sejarah Ogan Komering Ulu Timur	54
2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Martapura Ogan Komering Ulu Timur.....	56
B. Bantuan Hukum Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu No 2 Tahun 2013	61
C. Implementasi Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Kota Martapura.....	62

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Kota Martapura Kabupaten OKU Timur	69
B. Implementasi Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur Tentang Bantuan Hukum	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, maka akan diuraikan dan dijelaskan secara singkat istilah-istilah dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Timur No. 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-cuma (Studi di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur) Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok, yaitu sebagai berikut:

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan¹

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hokum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.³

¹ Hasan Alwi, Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2002), h. 67.

² I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), h.56

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h. 42.

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.⁴

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-cuma adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah Ogan Komering Ulu Timur.⁵

Bantuan hukum Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindak hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.⁶

Penjelasan sub judul di atas menegaskan kembali maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan dari Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No. 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Cuma-cuma di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di lihat dari kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong untuk diangkatnya masalah ini dalam bentuk skripsi , antara lain:

⁴ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Bandung: Mutiara Sumber Widya, 2002), h. 67.

⁵ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis,Fungsi,Materi Muatan)*, (Yogyakarta:Kanisius,2007), h. 203.

⁶ Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Depok: Kencana,2017), h. 105.

1. Karna masih banyaknya masyarakat Ogan Komering Ulu Timur yang tidak mengetahui adanya Peraturan yang dikeluarkan pemerintah Ogan Komering Ulu Timur mengenai Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma atau Gratis.
2. Masalah yang akan dibahas sesuai dengan bidang studi yang ditempuh dan tersedianya literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas.
3. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana setiap warga negaranya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum atau yang sering dikenal dengan asas *Equality Before The Law*. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, etnis maupun agama.

Negara hukum adalah sebuah konsep yang bersifat umum, yang secara sederhana negara hukum berarti negara yang menegakkan supremasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahannya, bukan supremasi kekuasaan. Dalam negara hukum, penguasa tidak bisa berbuat sesuai kehendak dan kemauan saja, karena segala tindak tanduk dan kebiasaan politiknya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.⁷

Rule of law didasarkan atas prinsip-prinsip kunci demokratis seperti kesetaraan di depan hukum, akuntabilitas terhadap hukum, pemisahan kekuasaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Seperti demokrasi,

⁷ Agustina Nurhayati, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Politik Hukum Dalam Islam*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2016), h. 11

Rule of Law adalah sebuah prinsip pemerintahan yang berlabuh dalam proses partisipatif dan konsultatif.

Akses keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dari *Rule of Law*. Dalam ketiadaan akses keadilan, masyarakat tidak bisa menyuarakan pendapat, mendapatkan hak-haknya, menentang diskriminasi atau menjaga akuntabilitas kebijakan. Karena itu kami terus mendorong hak atas kesetaraan akses terhadap keadilan bagi semua, termasuk kelompok rentan, dan mengafirmasi ulang komitmen kami untuk melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan yang adil, transparan, efektif, tidak diskriminatif serta akuntabel yang mendorong akses keadilan bagi semuanya.

Jika *Rule of Law* tidak ditegakkan, maka kemiskinan, penderitaan dan marginalisasi akan semakin buruk. Masyarakat miskin dan rentan membutuhkan kemampuan mengamankan hak-hak mereka, perlindungan hukum dan partisipasi dalam pengambilan kebijakan yang mempengaruhi komunitas mereka.

Kemiskinan pada umumnya dipahami masyarakat pada berbagai dimensi, yaitu: *pertama*, gambaran kekurangan materi, yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. *Kedua*, gambaran tentang kebutuhan sosial, seperti ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, kebutuhan akan

pendidikan dan informasi. *ketiga*, gambaran tentang kurangnya penghasilan kekayaan yang memadai.⁸

Kebutuhan akan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang cukup besar disatu sisi, dan berbagai keterbatasan yang dimiliki pemerintah pusat dalam memberikan layanan bantuan hukum, mengharuskan adanya peran serta pemerintah daerah dalam pelayanan bantuan hukum. Peran pemerintah daerah ini terutama menyangkut penyelenggaraan dan penganggaran bantuan hukum sehingga lebih memperluas jangkauan bantuan hukum.

Kesadaran pemerintah daerah untuk turut serta dalam memenuhi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh bantuan hukum sudah ada setidaknya di 16 provinsi dan 61 kabupaten/kota melalui pembentukan Perda Bantuan Hukum. Pada umumnya, Perda-Perda ini masih sepenuhnya mengacu pada mekanisme bantuan hukum yang diatur UU bantuan Hukum, dan belum menjangkau kebutuhan-kebutuhan yang lebih luas dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan bantuan hukum.

Ada dua jenis bantuan hukum yang dapat diberikan yaitu litigasi maupun non litigasi. Bantuan litigasi dapat diberikan oleh pemberi bantuan hukum di dalam pengadilan berupa pendampingan, pembelaan maupun mewakili. Sedangkan bantuan hukum non litigasi merupakan bantuan hukum yang diberikan di luar pengadilan seperti pemberian nasehat hukum.⁹

⁸ Fariza Makmun, *Pemetaan Kemiskinan di Kelurahan Sukarame Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 1

⁹ *Ibid.*, h. 107

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No.2 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Cuma-cuma menunjukkan arti pentingnya sebuah bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu agar terjamin hak-haknya dalam mengakses keadilan. Dengan adanya perda tersebut dimaksudkan agar seluruh masyarakat Ogan Komering Ulu Timur mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum.

Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum adalah amanat dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum diatur melalui Peraturan Daerah.

Islam pun mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong kepada sesama tanpa melihat suku, agama, dan budaya. Orang yang berilmu dapat membantu orang lain dengan ilmunya orang yang kaya dapat menolong orang dengan hartanya. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. [QS. Al-Maidah (4):2]”

Mayoritas penduduk Ogan Komering Ulu Timur yang berprofesi sebagai petani merupakan salah satu faktor minimnya pengetahuan mereka mengenai hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Sikap acuh tak acuh terhadap hal-hal di luar bidang pekerjaan mereka juga yang membuat mereka tidak mengerti dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu pola pikir yang tumbuh di masyarakat sampai saat ini menganggap apabila mereka ingin mendapatkan bantuan hukum itu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit menjadikan mereka enggan untuk menemui pihak pemberi bantuan hukum. Oleh karena itu tidak sedikit dari mereka saat tersandung masalah hukum tidak mendapatkan hak mereka untuk didampingi ataupun dibela oleh para pemberi bantuan hukum.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Irwantoni dan kawan-kawan, Melihat masih banyak warga yang ada di bawah garis kemiskinan bahkan hampir semuanya buta akan pengetahuan hukum dan pada umumnya mereka tidak mengetahui bagaimana menghadapi dan menyelesaikan perkara-perkara dalam kehidupan yang mereka alami, terutama menyangkut masalah perdata di pengadilan dan dengan kemiskinan yang menimpa mereka serta tidak mampu untuk membayar seorang pengacara untuk sekedar konsultasi maupun untuk mendampingi selama dalam proses persidangan.¹⁰

¹⁰ Irwantoni, Abdul Qadir Zaelani, Chaidir Nasution, "Peran bantuan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama (studi di Pengadilan Agama kelas IA Tanjungkarang Bandar Lampung)" ASAS Vol 10 No 2 2018, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 120 (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/3266> (22 Agustus 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

Berdasarkan hal itu masalah yang ada menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang bantuan hukum yang tertuang di dalam perda Ogan Komering Ulu Timur no 2 dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Ogan komering Ulu Timur No. 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-cuma (Studi di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”

D. Fokus Penelitian

Agar permasalahan yang dikaji dan diteliti lebih focus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Timur No. 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-cuma (Studi di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-cuma di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap Pelaksanaan Prarturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No. 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No. 2 Tahun 2013 mengenai Bantuan Hukum Cuma-cuma di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No. 2 Tahun 2013 mengenai Bantuan Hukum Cuma-cuma.

G. Signifikasi Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa jika terjerat masalah hukum kita berhak untuk mendapatkan bantuan hukum baik berupa bantuan ligitasi maupun non ligitasi.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan

makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden.¹¹

Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹²

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji *hipotesis*.¹³ Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada yaitu tentang Bantuan Hukum Cuma-cuma menurut Perda Ogan Komering Ulu Timur No. 2 Tahun 2013.

3. Partisipan dan Tempat Penelitian

Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel dengan mengambil responden tertentu, yang menjadi sampel penelitian yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut

¹¹ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 9.

¹² Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 5.

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 105.

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.¹⁴ Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pemerintah (Kasubag Bidang Hukum dan HAM OKU Timur), dan Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA, Panitera Pengadilan Agama Martapura, Masyarakat OKU Timur yang menerima bantuan hukum Cuma-Cuma (Ny Ici Marantika)

4. Prosedur pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁵ Maka untuk teknik pengumpulan data di perlukan wawancara.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dengan cara ini peneliti ingin mendapatkan informasi (data) untuk menjawab masalah penelitiannya atau membuktikan kebenaran hipotesanya yang tidak dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data lainnya

b. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan yakni alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

¹⁴ *Ibid.*, 393

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 244.

c. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen

5. Prosedur Analisis Data

adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan komparatif. komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum ini hendak menilai kejadian yang khusus.¹⁶

¹⁶ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h.181.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bantuan Hukum Menurut Hukum Positif

1. Sejarah Bantuan Hukum

Sebelum membahas tentang pengertian bantuan hukum maka harus diketahui awal mula dari sejarah adanya bantuan hukum. Apabila bantuan hukum diartikan sebagai *charity* maka sebenarnya bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1500-an bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Apabila diartikan secara luas, bantuan hukum dapat berupa meminta nasihat kepada kepala Adat jika ada suatu permasalahan.¹

Kebutuhan akan strategi pembangunan hukum yang responsif merupakan faktor pendorong dalam gerakan bantuan hukum yang terjadi di Negara berkembang. Pembangunan hukum adalah segala usaha yang dilakukan oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat untuk memengaruhi pembentukan, konseptualisasi, penerapan, dan pengembangan hukum dalam suatu proses politik. Suatu produk hukum yang responsif terhadap tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat hanya akan dapat dicapai melalui strategi pembangunan hukum yang menempatkan hukum sebagai wahana emansipasi. Strategi responsif hukum sebagai suatu alat bagi perubahan yang independen terhadap suatu sistem politik. Strategi hukum responsif akan me mberikan

¹ Yolanda putri dewanti, "Implementasi Bantuan Hukum Oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana" (skripsi program S1 Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013) h. 12

ruang yang besar bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum dan memungkinkan lembaga peradilan menjadi kreatif dan mandiri.

Kebutuhan yang sama juga dirasakan di Indonesia. Hanya saja meskipun sudah mulai berkembang sejak zaman pra kemerdekaan, bantuan hukum yang berkembang sebelum dekade 1970-an tersebut lebih merupakan tanggung jawab moral maupun inisiatif profesional para advokat dalam membela hak asasi manusia dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Membela orang miskin juga bagian dari pelaksanaan prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak setiap orang. Tidak bisa di pungkiri bahwa, secara umum bantuan hukum yang berkembang saat itu masih bersifat tradisional sehingga pelayanan yang diberikan lebih bersifat individual, pasif, terbatas, pada pendekatan formal legal sehingga bertumpu pada pendampingan kasus dan pembelaan, baik didalam maupun luar pengadilan.²

Amandemen terhadap UUD 1945 merupakan titik awal perubahan, mengingat selama rezim orde baru perubahan UUD merupakan suatu hal yang tabu. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002. Konsep bahwa indonesia adalah negara hukum semakin diperkukuh melalui perubahan ketiga yang terjadi pada tahun 2001. Sebelum amandemen terjadi konsep negara hukum hanya disebutkan dalam penjelasan. Namun setelah

² Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktek Bantuan Hukum di Indonesia*, (depok: Kencana, 2017), h. 109.

perubahan ketiga itu, pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas merumuskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Nasution menilai bahwa bangkitnya paham konstitusionalisme pada orde baru memegang peran kunci bagi perluasan gerakan bantuan hukum. Konstitusionalisme adalah abstraksi yang lebih tinggi dari *rule of law* dan menekankan pentingnya suatu negara terbatas dimana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan penerimaannya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum. Paham ini pada dasarnya menghendaki pemulihan negara hukum sesuai konstitusi yang berlaku sebagai koreksi atas berbagai penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Secara umum mereka menghendaki pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, kultural, sosial dan pendidikan; Peradilan yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh suatu kekuatan atau kekuasaan lain apapun; dan legislasi dalam arti hukum dalam segala bentuk.

Berkembangnya pemikiran konstitualisme ini dipengaruhi oleh masuk dan menguatnya pemikiran liberalisme di Indonesia khususnya dikalangan kelas menengah, pada dekade 70an. Faktor tersebut kemudian mendorong bergesernya pola bantuan hukum dari hukum tradisional menjadi gerakan bantuan hukum konstitusional. Bantuan hukum konstitusional merupakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di

dalam pengadilan. Pola ini berusaha menyadarkan masyarakat miskin, atas hak-hak yang dimilikinya serta menempatkan penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama tegaknya negara hukum.³

Penguatan Indonesia sebagai negara hukum pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberi pesan adanya keinginan kuat agar negara menjamin adanya persamaan kedudukan dalam hukum, antara lain dengan diaturnya hak setiap orang agar mendapatkan perlakuan yang sama, serta jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan akses keadilan. Hak-hak ini bahkan sesungguhnya adalah hak-hak dasar setiap orang yang bersifat universal. Konsep ini menjadi penting untuk dipahami karena selama ini negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu sehingga tidak dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan keadilan. Untuk mewujudkan gagasan negara hukum tersebut, maka negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum bagi orang miskin. Atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan sebagai amanat konstitusi.

Tanpa menafikan kemajuan-kemajuan yang dibawa oleh bantuan hukum konstitusional pada akhir 1970-an mulai timbul kegelisahan akan masih terbatasnya kemampuan gerakan bantuan hukum untuk menembus

³ *Ibid.*, h. 111.

permasalahan dasar yang dihadapi masyarakat miskin di Indonesia yang diperkuat dengan munculnya wacana kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul secara alamiah namun disebabkan struktur kelembagaan yang timpang. Dalam kemiskinan struktural ini hukum tidak lagi bersifat netral. Nasution mengatakan bahwa bantuan hukum bukan hanya merupakan aksi kultural, namun juga melibatkan aksi struktural untuk mengubah tatanan masyarakat dan membebaskan masyarakat dari struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sarat dengan penindasan. Ditinggalkannya netralitas serta kebutuhan akan perubahan struktural itulah yang mendorong pergeseran gerakan bantuan hukum dari yang bersifat konstitusional menjadi bantuan hukum struktural.

Para aktivis Pemberi Bantuan Hukum memasukkan konsep bantuan hukum gender struktural sebagai respon atas ketidakadilan gender akibat relasi kuasa yang timpang antar jenis kelamin. Kegiatan bantuan hukum yang dikembangkan meliputi penyadaran dan pengorganisasian masyarakat, kampanye pers dan kerjasama dengan wartawan yang lain, mengusahakan partisipasi mitra yang optimal dalam penanganan perkara hukum dan keadilan, menggali dan membuat nyata serta menganalisis kasus-kasus pelanggaran keadilan yang belum manifest, mengusahakan kerjasama dengan kekuatan yang ada dan tumbuh di masyarakat diantaranya tokoh informal baik individual maupun kolektif.⁴

⁴ Iwan Wahyu Pujiarto, et. al. "Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dikaitkan dengan undang-undang no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum" arena hukum volume 8 nomor 3 tahun 2015 (fakultas hukum universitas Brawijaya), h. 329 (on-line), tersedia di

Bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan politik maupun ekonomi. Tujuan akhir bantuan hukum struktural bukan lagi menawarkan jasa bantuan hukum kepada rayat, namun lebih kepada perubahan tatanan sosial dari yang semula timpang menjadi lebih berkeadilan⁵

Pasca perubahan ketiga, mulai bergulir wacana akan pentingnya Undang-undang Bantuan Hukum, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia bersama sama dengan elemen sipil lainnya menggulirkan berbagai program dengan tajuk “*justice for the poor*” dan “*access to justice*”. Gagasan ini disambut baik oleh berbagai pihak dan diperkuat dengan dibentuknya nota kesepahaman antara Bappenas dengan berbagai lembaga internasional.

Wacana pentingnya keberadaan UU Bantuan Hukum semakin menguat ketika dalam proses pembahasan Rancangan Undang-undang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan RUU advokat, dibahas juga masalah bantuan hukum. Selain itu momentum lahirnya UU Bantuan Hukum juga tidak lepas dari dua peristiwa penting. Pertama, diselenggarakannya pertemuan puncak mengenai bantuan hukum yang dibuka oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua, disusunnya strategi nasional Bappenas yang juga mencakup isu *access to justice*. Dalam

<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/208> dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Diunduh pada 2 september 2019 pukul 14:28

⁵ Jandi Mukianto, *Prinsip dan praktek bantuan hukum di Indonesia* ...112

program Bappenas itulah disebutkan program pemerintah untuk membuat RUU Bantuan Hukum. Hal ini disambut positif oleh kelompok masyarakat sipil dengan disusunnya naskah akademik dan *draf* Bantuan Hukum.

Berbicara tentang sejarah bantuan hukum tidak terlepas dari sosok S. Tasrif dan Adnan Buyung Nasution. S. Tasrif adalah yang orang pertama yang menyatakan bahwa bantuan hukum si miskin merupakan satu aspek cita-cita dari *rule of the law*. Kemudian untuk mewujudkan idenya tersebut, S. Tasrif menyatakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta untuk diberikan satu ruangan yang dapat digunakan untuk para advokat secara bergiliran untuk memberikan bantuan hukum. Sedangkan Adnan Buyung Nasution mengajukan ide untuk pembentukan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia kemudian ditindaklanjuti dengan berdirinya LBH Jakarta (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta) sebagai Lembaga Bantuan Hukum pertama di masyarakat maka orang tidak berharap banyak dari Lembaga Bantuan Hukum tersebut.⁶

Jaminan *Access to justice* atau akses pada keadilan memiliki makna persamaan dengan hak untuk memperoleh, menggunakan dan mendapatkan manfaat dari proses keadilan yang diperoleh melalui pengadilan maupun melalui mekanisme nonformal. Akses disini semestinya memungkinkan masyarakat miskin mendapatkan jaminan dan pengakuan dalam menggunakan hukum acara dan sarana dalam sistem peradilan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil. Sebagai tambahan, kata

⁶ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 95.

akses dapat diartikan sebagai sebuah metode dan prosedur. Upaya memperluas akses masyarakat miskin atas keadilan tanpa membahas metode dan prosedur pelayanan, pencapaian dan pemenuhannya, bisa berakibat keadilan tidak akan pernah dinikmati oleh masyarakat miskin. Akses pada keadilan ini semestinya memungkinkan masyarakat miskin mendapat jaminan dan pengakuan dalam menggunakan hukum acara dan sarana dalam sistem peradilan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil⁷

Jika dilihat dari sistem/pola kerja penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka Bantuan Hukum masuk pada ciri-ciri kewenangan absolut pemerintah pusat. Hal ini diperkuat bahwa pelaksanaan bantuan hukum ini dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Hukum dan HAM BPHN) atau dilimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM) atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Dalam menjalankan fungsinya terhadap penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Pusat (Menteri) memiliki tugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;

⁷ Fachrizal Afandi, "implementasi pengabdian masyarakat berbasis Access to justice pada LBH kampus negeri pasca pemberlakuan undang-undang bantuan hukum" rechtsvinding vol 2 no 1 2013, (depok: fakultas hukum universitas brawijaya, 2013), h. 41. (on-line) tersedia di <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTIKEL%203%20Vol%202%20No%201.pdf> (20 agustus 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

- d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran

dan memiliki kewenangan meliputi:

- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum
- b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum

2. Pengertian Bantuan Hukum

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.⁸ Pengertian lain, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.⁹

⁸ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 23.

⁹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*,..h. 1.

Di negara Barat istilah tentang bantuan hukum dipergunakan dalam dua arti yaitu “*legal aid*” dan “*legal assistances*”.

a. *legal aid*, Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum diarahkan pada sosok penasehat hukum sebagai seorang ahli hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum. Jadi, *legal aid* berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini:

- 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- 2) Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- 3) Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

b. *Legal Assistance*, Dalam pengertian ini. Makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum. Sehingga dalam pengertian itu, sebagai ahli hukum ia dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada mereka yang miskin saja, tapi juga bagi mereka yang mampu membayar

prestasi. Bagi sebagian orang kata *legal aid* selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sebagian orang kata *legal aid* ini ditafsirkan sama dengan *legal assistance* yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah *legal aid* sebagai bantuan hukum sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

c. *Legal Service*, Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah “*legal service*”. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*. Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum. Sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum menurut Diaz dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun didalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.¹⁰

Bantuan Hukum memiliki 4 konsep dalam penerapannya. *Pertama*, Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang

¹⁰ *Ibid.*, h. 10.

diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. *Kedua*, Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.¹¹ *Ketiga*, Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.¹² *Keempat*, bantuan hukum responsif¹³ diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia serta tanpa membedakan pembelaan baik perkara individual maupun kolektif. Jasa yang diberikan dalam bantuan hukum responsif berupa penyuluhan hukum tentang hak asasi manusia dan proses hukum hak untuk dibela oleh organisasi bantuan hukum dan atau advokat, pembelaan dalam mengatasi masalah masalah hukum yang kongkrit, pembelaan yang berkualitas didalam pengadilan agar

¹¹ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 462.

¹² Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008), h. 77.

¹³ Frans Hendra Winata, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeroleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 12.

menghasilkan yurisprudensi yang lebih tegas tepat jelas dan benar, pembaharuan hukum melalui keputusan pengadilan yang berpihak kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat untuk menyukkseskan konsep tersebut bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam masyarakat di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang undang. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa yang diberikan seorang Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Adapun persyaratan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran.¹⁴

3. Dasar Hukum

Bantuan hukum dilaksanakan bardasarkan dari ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

¹⁴ Abdul manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana. 2006), h. 67 .

a. Undang-undang Dasar Tahun 1945

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28h

- (1) bahwa tiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara¹⁵

b. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 57

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁷

d. Intruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Pasal 1 ayat (3)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

¹⁷ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Advokat

(3) Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu

f. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

4. Asas-Asas Pemberian Bantuan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut KEMENKUMHAM) sesuai dengan tugasnya dalam mengimplementasikan Undang-undang Bantuan Hukum wajib menyusun dan menerapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum dan mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum tersebut dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ini. Hal tersebut bertujuan agar dengan dilaksanakannya bantuan hukum cuma-cuma tersebut yang berdasarkan asas-asas yang telah diatur di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum maka terdapat pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dan peraturan yang konkrit dan bersifat abstrak.

Asas-asas yang menjadi landasan pemberian bantuan hukum Cuma-cuma yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Bantuan Hukum antara lain:

a. Keadilan

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Tahun 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum demikian pula dengan hak untuk didampingi Advokat dijamin sistem hukum Indonesia dalam pembelaan umum bagi orang miskin atau *pro bono publico*. Dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

b. Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum

Indonesia sebagaimana di bagian lain di dunia khususnya di negara berkembang, mempunyai problem ketidakserasian sumber hukum antara yang kaya dan yang miskin. Hampir semua orang di Indonesia menganggap penggunaan jasa Advokat mahal dan mewah. Melalui asas ini, sebagaimana dijelaskan juga dalam penjelasan Undang-undang Bantuan Hukum, bahwa setiap orang mempunyai hak dan diperlakukan sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

c. Keterbukaan

Salah satu contoh penerapan asas keterbukaan dapat dilihat dari pelaksanaan penyaluran dana dalam bantuan hukum cuma-cuma. Pada persyaratan perolehan dana yang dilakukan dengan *reimbursement*, yaitu dengan sistem pergantian dana yang dikeluarkan oleh pemberi bantuan hukum terlebih dahulu, apabila tidak memenuhi syarat maka tentu tidak akan dicairkan dana bantuan hukum tersebut, oleh sebab itu keterbukaan

mengenai laporan mana yang ditolak dan apa alasan penolakannya memiliki potensi penyalahgunaan Anggaran Negara.

Asas keterbukaan dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum juga mencakup dalam hal memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara Konstitusional.

d. Efisiensi

Dalam pelaksanaannya, asas efisiensi dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum bahwa pada pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Dengan melalui asas ini diharapkan proses pemberian dari bantuan hukum tersebut diberikan kepada orang yang tepat sehingga tepat sasaran

e. Efektivitas

Salah satu kewajiban Advokat sebagai penegak hukum adalah memberikan jasa bantuan hukum terhadap pencari keadilan yang tidak mampu secara cuma-cuma. Maka Advokat sesuai dengan penjelasan asas efektivitas dalam Undang-Undang Bantuan Hukum bahwa Advokat adalah sebagai penentu dalam pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

f. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum adalah setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.¹⁸

5. Pihak-Pihak Pemberi Bantuan Hukum

a. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Lembaga Bantuan Hukum atau LBH adalah lembaga yang didirikan untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. LBH tidak bisa didirikan begitu saja, melainkan harus memenuhi ketentuan tertentu yang ditetapkan di dalam UU Bantuan Hukum dan peraturan turunannya.

LBH harus melalui proses verifikasi dan akreditasi agar kualitas pelayanan dan pekerjaan yang dilakukan oleh LBH terukur. Adapun syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2013,¹⁹ antara lain:

- 1) Berbadan hukum;
- 2) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- 3) Memiliki pengurus;
- 4) Memiliki program bantuan hukum;
- 5) Memiliki advokat yang terdaftar pada LBH; dan
- 6) Telah menangani paling sedikit sepuluh kasus.

¹⁸ Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

¹⁹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2013

Bagi para pencari keadilan yang hendak meminta bantuan LBH, dapat langsung menghubungi LBH yang diinginkan. Adapun persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan LBH, mengikuti persyaratan yang ada dari masing-masing LBH.

b. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum, atau biasa disingkat dengan Posbakum, adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.²⁰

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Penyelenggara pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Ketua Pengadilan, Panitera/Sekretaris, Petugas Posbakum Pengadilan dan staf Pengadilan yang terkait lainnya.

Posbakum diperuntukkan bagi setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada

²⁰ Jandi Mukianto, *Prinsip dan praktek bantuan hukum di Indonesia*,... h. 120.

Posbakum Pengadilan. Orang tersebut adalah penggugat/pemohon; tergugat/termohon; terdakwa; atau saksi.

Pengajuan Posbakum dengan melampirkan dokumen:

- 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- 2) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
- 3) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

c. Pengacara Probono

Alternatif lainnya adalah menggunakan jasa pengacara probono. Probono dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau pelayanan hukum

yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Jasa pengacara probono singkatnya dapat diartikan sebagai jasa bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara secara cuma-cuma.

Pengacara untuk memberikan jasa probono adalah kewajiban. Pasal 22 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa pengacara memiliki kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi pihak yang membutuhkan. Aturan internal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memberikan kewajiban bagi pengacara untuk memberikan jasa hukum probono selama 50 jam per tahun.²¹

6. Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Diatur dalam Undang-undang No 16 Tahun 2011 pasal 8 meliputi:

- a. Berbadan Hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-undang ini;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program bantuan Hukum.²²

7. Syarat Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Terdapat dua jenis penerima bantuan hukum, yaitu masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Penggunaan kriteria masyarakat

²¹ Aradila caesar, dkk., *Pro Bono prinsip dan Praktik di Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), h. 14.

miskin hanya mempertimbangkan kualifikasi ekonomi, sementara masyarakat tidak mampu menggunakan dimensi yang lebih luas daripada ekonomi, seperti ketidakmampuan akibat konflik komunal, atau perbenturan social yang melibatkan subyek hukum warga secara kolektif. Pada kriteria masyarakat tidak mampu apabila membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak memenuhi kualifikasi ekonomi tetap berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa menimbulkan persoalan apakah negara akan mengeluarkan biaya atau tidak. Artinya, paradigma dalam bantuan hukum tidak hanya disimplifikasi pada ranah teknis administratif, seperti soal dikeluarkannya biaya atau tidak. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.²³

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

8. Jenis Layanan Bantuan Hukum

Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah harus mencakup semua jenis kasus serta kompetensi peradilan, meliputi masalah hukum

²³ Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum pasal 14

keperdataan, pidana, tata usaha negara, dan uji materil di Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi termasuk hubungan industrial, niaga, dan agama, baik litigasi maupun nonlitigasi. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi harus mencakup layanan:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau gugatan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.²⁴

Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi. Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi meliputi :

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau

²⁴ Tim Penulis Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Dalam Negeri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Yayasan TIFA, *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah*, (Jakarta, 2018), h. 18

i. drafting dokumen hukum.

Pemberian bantuan hukum untuk upaya banding dan kasasi dapat ditempatkan sebagai pelayanan yang terpisah dari pemberian bantuan hukum di pengadilan tingkat pertama. Pemberian bantuan hukum nonlitigasi dan litigasi untuk kasus yang sama dapat ditempatkan sebagai pelayanan pemberian bantuan hukum yang terpisah. Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian/Kontrak Kerja antara Pemberi bantuan hukum dengan Pemerintah Daerah.

B. Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama yang sangat menunjung tinggi keadilan, termasuk keadilan dalam penegakan hukum. Hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu : Melindungi Agama, Melindungi Jiwa, Melindungi Keturunan, Melindungi Akal, Melindungi Harta Benda

Menurut Harun Nasution, hanya ada kurang dari sepuluh persen tepatnya sekitar 5,8 persen kandungan Al-Quran yang berbicara tentang hukum dan perundang-undangan. Selebihnya Al-Quran banyak berbicara tentang sejarah umat manusia. Dari sepuluh persen itu ayat-ayatnya ada yang secara jelas (*muhkam* atau *qath'î*) menjelaskan tentang suatu hukum, tetapi ada juga yang tidak jelas atau samar (*mutasyâbihât* atau *dzannî*) menerangkan tentang suatu perkara hukum. Oleh sebab itu, sebetulnya Al-Quran ingin memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk mengatur urusan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemaslahatan hidupnya di dunia ini. Karena

itu, di beberapa negara muslim tidak ada keseragaman mengenai strategi yang digunakan.²⁵

Pemberian bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap perlindungan jiwa atau bisa juga dikenal dengan perlindungan HAM. Teori HAM yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu mengenai teori persamaan hak hukum manusia. Dalam hukum Islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam Human Right in Islam bahwa ,secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat' (*all human beings are born and equal in dignity and right*).²⁶

Subhi Mahmasami dalam bukunya *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam* menjelaskan konsep HAM dalam Islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini berpijak secara normatif pada prinsip persamaan (*al-musawat*) dan kebebasan (*al-hurriyat*) dalam norma-norma syari'ah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan dan agama, sikap politik, status sosial, dan lain-lain.

²⁵Saifuddin. "Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia" Al-'Adalah vol 14 no 2 2017, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2516> (21 Agustus 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

²⁶Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 36.

Persamaan hak ini menjadi dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam.²⁷

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *Al-Wakalah fi Al-Khusumah*. Menurut Sayyid Sabiq, *Al Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.²⁸ *Al-wakalah* masih bersifat umum, mencakup semua akrifitas perwakilan di bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan sebagainya. Adapun *Al-Wakalah fi Al-Khusumah* (kuasa hukum) secara khusus ditemukan dalam perkara atau sengketa di pengadilan.

Konsep yang terdapat dalam hukum Islam, manusia kedudukannya sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum syara' (*maqhasid al-syari'ah*) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi.²⁹

²⁷ *Ibid*, h. 38.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 13-terjemahan*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 55.

²⁹ Didi kurnandi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, ...h. 29-30

Teori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam Islam tersebut, dalam prakteknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan terhadap HAM juga berhak dimiliki oleh tersangka atau terdakwa.

Profesi pengacara sudah dikenal oleh Masyarakat Yunani dan Romawi dan diatur oleh negara. Dalam perkembangan selanjutnya, para fuqaha mengkonsepsikan pembelaan tersebut dalam bentuk yang lebih dinamis dan komprehensif kedalam sistem wakalah (perwakilan). Sistem wakalah di pengadilan banyak kemiripan dengan sistem kepengacaraan. Hanya saja hukum Islam (fiqh) dengan ragam mazahab yang ada menetapkan bahwa untuk membentuk wakalah harus memenuhi dua hal penetapan wakalah harus didepan hakim, dan pihak lawan dapat menerima keberadaan wakil tersebut.³⁰

Dalam islam juga mengenal pemberi jasa bantuan hukum yaitu seorang mufti. Menurut Hasbi Ash shieddieqy pada hakikatnya mufti adalah menyampaikan hukum Allah kepada umat manusia.

1. Dasar Hukum

Q.S An-Nissa: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”[Q.S An-Nissa (4) : 35]

Q.S Al-Hujurat: 13 yang menjadi dasar adanya hak persamaan derajat

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”[Q.S Al-Hujurat (49) : 13]

Q.S. Al-Ma'idah: 2 dan 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan,

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”[Q.S. Al-Ma'idah (5) : 2]

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa agama Islam sangat menganjurkan untuk tolong menolong antar sesama manusia terutama pada suatu hal yang positif dan baik yang di dalam ayat tersebut disebut dengan *al-birr* yang berarti kebajikan, dan mengecam bentuk pertolongan apapun yang mengarah pada suatu hal negatif yang menyangkut masalah dosa, permusuhan, maupun perkara-perkara yang dilarang oleh agama yang dalam

ayat diatas disebut *Al-itsmu*. Kata *Al-Birr* (kebajikan) dan kata *Attaqwa* mempunyai makna yang erat. Masing-masing menunjuk pada pengertian menjunjung semua perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul. Kata *Al-birr* berarti kebaikan, kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan secara menyeluruh, mencakup segala macam dan ragam yang dianjurkan agama, termasuknya kedalamnya memberi bantuan hukum secara gratis.³¹

Ayat Al-maidah tersebut mengandung isi anjuran saling tolong menolong terhadap sesama, namun dengan garis bawah adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa, seperti memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan salah satu bentuk dari perilaku tolong menolong dan dalam islam sangat menganjurkan hal tersebut. Dengan catatan bahwa yang dibela adalah hak-haknya sebagai manusia bukan berarti membenarkan perilaku salahnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”[Q.S. Al-Ma’idah (5) : 8

³¹ Didi kurnandi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, ...h 40

Q.S. Al-Baqarah: 188 yang menjadi dasar hak perlindungan harta dan milik,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”[Q.S. Al-Baqarah (2): 188]

Q.S. Yunus: 99 yang menjadi dasar hak kebebasan beragama,

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٩٩﴾

“dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.”[Q.S. Yunus (10): 99]

2. Advokat

Adapun dalam hukum Islam, istilah advokat atau pengacara dapat disetarakan dengan istilah *Al-Wakalah*, yang dalam bahasa Arab berarti perwakilan. dalam surah al-Kahfi: 19 yang berbunyi

... قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

“...berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”[Q.S. Al-Kahfi (18) : 19]

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, jumhur ulama membolehkan berwakil dalam segala hal, termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan untuk dirinya: umpamanya karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam berperkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan³²

Al-Wakalah dalam fikih Islam merupakan salah satu bentuk transaksi dalam rangka tolong-menolong antar pribadi dalam masalah perdata dan pidana. Ada dua definisi yang dikemukakan para ahli fikih tentang *Al-wakalah*. Menurut ulama mazhab Hanafi, *Al-Wakalah* yaitu pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Sementara menurut ulama mazhab Syafi'i *Al-Wakalah* yaitu pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi ia hidup

Rukun *Al-Wakalah* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu yang mewakilkan, wakil, hal yang diwakilkan dan *sigah* (lafal) wakil. Sementara menurut ulama hanafi rukun *Al-Wakalah* adalah *sigah*, yaitu ijab dan kabul, sedangkan tiga rukun lainnya diatas termasuk dalam syarat *Al-Wakalah*.

³²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 981.

Menurut mereka jika ijab dan kabul tidak ada maka *Al-wakalah* tidak sah. Ijab harus dinyatakan secara jelas dan tidak harus dijawab langsung dengan kabul, tetapi boleh berselang beberapa waktu. Apabila seseorang menunjuk orang lain untuk menagih uangnya, kemudian orang yang ditunjuk ini menjawab tidak mau, tetapi ternyata ia pergi memint uang tersebut, maka menurut ulama mazhab hanafi, *Al-wakalahnya* tidak sah dan rukunnya belum sempurna karena orang yang ditunjuk sebagai wakil belum mengucapkan kabul.

Lembaga berikutnya pemberi bantuan hukum dalam islam adalah *Mushalih-alaih*. *Mushalih-alaih* adalah pembantu pembuat perjanjian agar kedua belah pihak dapat berdamai. Lembaga ini tugasnya adalah memberikan bantuan hukum berupa pembuatan perjanjian damai. Sesungguhnya bisa dibilang lembaga ini mengusahakan adanya perdamaian antara penggugat dan tergugat tanpa harus berada di meja pengadilan. Orang yang melakukan perdamaian adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum (cakap hukum) dan juga mengerti dan faham dengan hukum perjanjian yang akan dilakukan.

Sederhananya dari lembaga *musalih-alaih* ini adalah pihak yang diberi kuasa oleh orang yang berperkara untuk melakukan perjanjian damai atas sebuah perselisihan. Jika dikaitkan dengan fungsi advokat sebagai kuasa hukum maka fungsi ini hampir sama dengan peran advokat sebagai kuasa hukum atas kliennya untuk membantu membuat akta perjanjian.

Wewenang kuasa hukum dalam islam terkait dengan dua hak, yakni hak Allah SWT atau hak universal (*huquq Allah*) dan hak manusia secara perseorangan (*huquq Al-Ibad*). Yang berkaitan dengan hak-hak Allah ada dua macam yaitu:

- a. Perkara yang tidak membutuhkan dakwaan atau tuduhan, seperti menetapkan seseorang telah melakukan zina atau meminum minuman yang memabukan. Perkara seperti ini tidak bisa dikuasakan kepada orang lain sebab itu semata-mata wewenang hakim atau penguasa
- b. Hak-hak Allah yang membutuhkan dakwaan atau tuduhan (delik aduan), seperti tuduhan terhadap seorang pencuri dan tuduhan kepada seorang yang menuduh orang lain telah berbuat zina.

Dalam hal ini hakim atau penguasa boleh menguasai tuduhannya kepada penuntut umum dan begitu juga tertuduh boleh menunjuk kuasa hukum sebagai wakilnya dalam berpekara di Pengadilan. Kuasa hukum disini untuk mengemukakan bukti atau saksi (*al-bayyinah, asy-syahadah*). Pelaksanaan hukuman pun bisa dikuasakan oleh hakim kepada orang lain.

Adapun yang berkaitan dengan hak manusia perseorangan atau hamba juga terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Perkara-perkara yang hukumannya tidak boleh didasarkan pada keraguan (*asy-syubhah*). penetapan hukumannya boleh dikuasakan kepada orang lain tapi harus dihadiri oleh yang memberi kuasa, seperti dalam perkara pembunuhan, karna masih ada peluang bahwa penuntut atau keluarga korban memaafkan terdakwa.

b. Perkara-perkara yang mengandung keraguan sering terjadi dalam perkara atau sengketa harta benda, seperti pembayaran hutang dan sebagainya. Keraguan bisa terjadi dalam jumlah hutang atau jangka waktu akhir pembayarannya. Perkara seperti ini boleh dikuasakan kepada orang lain baik untuk menerima dan membayar hutangnya, menuntut, dan menetapkan hukumnya.

Pemberian bantuan terhadap terdakwa, kendati ada dugaan kuat ia bersalah, dapat dibenarkan dalam Islam. Disamping untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, bantuan hukum juga ikut mencari jalan keluar dari dua kemungkinan kemudharatan yang dihadapi, seperti bunyi kaidah fiqh (*irtikab akhaff ad-dararain*) yaitu mencari kemudharatan yang ringan dari dua kemudharatan. Kemudharatan pertama mungkin terdapat pada kekeliruan hakim dalam mengambil keputusan karena ketidaktahuan terdakwa atau pihak yang berperkara, sedangkan kemudharatan kedua mungkin terdapat pada terdakwa atau pihak yang berperkara yang keliru memberi keterangan

Asas praduga tidak bersalah sejalan dengan kaidah fiqh lainnya yang mengatakan (*al-asl bara'ah az-zimmah*) yaitu pada dasarnya manusia terbebas dari tanggungan atau tuntutan. Cara seperti ini termasuk dalam pesan Rasulullah SAW yang mengatakan “ siapa yang membantu orang lain keluar dari kesulitan yang dihadapinya, maka Allah akan memberikan pula kelapangan baginya di hari kiamat nanti” HR Muslim. Disini kuasa hukum

bekerja membantu meringankan hukuman terdakwa sesuai dengan kesalahannya, bukan membantu agar ia terbebas dari kesalahannya.³³

3. Syarat Pemberi Bantuan Hukum

- a. Pemberi kuasa (*al muwakkil*) harus terkait dengan materi yang diperkarakan, atau secara hukum berhak atas perkara yang dikuasakannya;
- b. Wakil ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukannya harus tegas, sehingga benar-benar tertuju pada wakil yang dimaksud
- c. Tidak boleh seorang gila atau anak kecil karena tergolong belum/tidak berakal, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan perolehan manfaat semata-mata, seperti menjadi wakil untuk menerima pemberian, dan sebagainya;
- d. Pemberi kuasa (*al muwakkil*) harus orang yang bebas mengeluarkan pendapat, cakap dalam bertindak, dan rela menguasai perkaranya kepada orang lain. Pendapat ini disepakati oleh jumbuh ulama fikih. Bahkan Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa tidak sah berwakil tanpa rida dari pihak yang berperkara³⁴

4. Syarat Penerima Bantuan Hukum

syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penerima kuasa (*al-wakil*), diantaranya adalah sebagai berikut:

³³ *Ibid.*, 984

³⁴ https://www.academia.edu/30617784/Definisi_Wakalah_Rukun_dan_syarat_wakalah_dasar_hukum_wakalah diakses 1 agustus 2019, jam 09.00

- a. Berakal, tidak gila atau anak kecil, dan bebas dalam mengeluarkan pendapat;
- b. Mengetahui pokok perkara (ahli dalam berperkara), serta mengetahui tipuan-tipuan yang bisa memutarbalikkan fakta atau bukti. Persyaratan ini diperlukan karena ia mewakili kepentingan orang yang mempunyai perkara dan ia harus ahli dalam memberikan berbagai pertimbangan;
- c. Antara pemberi kuasa dan penerima kuasa diisyaratkan adanya kerelaan.³⁵

5. Syarat Perkara Yang Akan Dikuasakan

- c. Berisikan hal-hal yang dibolehkan dalam syarak, tidak termasuk unsur penipuan atau penghalalan yang haram;
- d. Benar-benar pemilik pemberi kuasa; jika tidak, ia tidak dibenarkan menguasakannya kepada orang lain;
- e. Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan untuk tujuan penipuan dan pelanggaran;
- f. Tidak boleh dalam bentuk tuntutan pinjaman dari pihak lain, karena hal ini biasanya dapat dilakukan dengan mengutus seseorang untuk menagihnya, dan
- g. Dapat ditaksir atau diganti dengan uang; karena itu, pelaksanaan ibadah, seperti salat dan puasa, tidak boleh dikuasakan kepada orang³⁶

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

6. Akibat Hukum Akad Al-Wakalah

Apabila suatu akad al-wakalah telah memenuhi rukun dan syarat yang dikemukakan diatas, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wakil itu seorang pengacara, maka ia bebas untuk bertindak hukum sebagai wakil yang ditunjuk untuk dan atas nama orang yang diwakilinya sesuai dengan kualitas dan kuantitas perwakilan
- b. Apabila perwakilan berhubungan dnegan masalah jual beli, maka ulama fikih membedakannya antara perwakilan secara mutlak dan perwakilan secara terbatas. Dalam perwakilan secara mutlak ulama fikih sepakat menyatakan bahwa wakil bebas bertindak dalam jual beli yang diwakilkan itu. Adapun dalam perwakilan secara terbatas, wakil harus bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh orang yang diwakilinya. Ia tidak dibenarkan membeli atau menjual barang melebihi apa yang akan dibeli, maka wakil harus melakukan pembelian atas dasar kemaslahatan orang yang diwakilinya.³⁷

7. Berakhirnya Akad Al-Wakalah

Ulama fikih menyatakan bahwa akad al-wakalah dianggap berakhir apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Wakil diberhentikan oleh orang yang diwakilkannya. Mazhab hanafi memberikan syarat dalam memberhentikan wakil antara lain wakil mengetahui tugasnya dicabut baik secara lisan maupun tulisan, dalam perwakilan itu tidak tersangkut hak orang lain

³⁷ *Ibid.*, h. 1914

- b. Orang yang mewakilkan melakukan suatu tindakan hukum terhadap objek yang diwakilkan
- c. Tujuan yang ingin dicapai dari perwakilan telah tercapai.
- d. Salah satu pihak (wakil atau yang diwakilkan) berubah status menjadi seorang yang tidak cakap bertindak hukum, seperti gila atau dikenakan status dibawah pengampunan.
- e. Salah satu pihak meninggal dunia.
- f. Orang yang mewakilkan atau yang diwakilkan itu keluar dari agama Islam.
- g. Wakil mengumumkan pengunduran dirinya sebagai wakil dan diketahui oleh orang yang diwakilkan.
- h. Hilangnya barang yang menjadi objek perwakilan
- i. Barang yang diwakilkan tidak lagi menjadi milik orang yang mewakilkan.
- j. Orang yang mewakilkan jatuh failit
- k. Terjadinya penipuan oleh masing-masing pihak
- l. Munculnya tindakan sewenang-wenang dari masing-masing pihak terhadap objek yang diwakilkan.
- m. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri masa perwakilan³⁸

³⁸ *Ibid.*, h. 1915

C. Tinjauan Pustaka

Bantuan hukum menjadi salah satu upaya untuk mendorong pelaksanaan hak-hak warga Negara dalam menjalani proses hukum. Bantuan hukum juga berpeluang dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak hukum individu yang sudah diatur dalam peraturan perundangundangan maupun instrument hukum internasional. Pengaturan bantuan hukum dalam undangundang tersendiri merupakan salah satu bentuk penegasan terhadap hak masyarakat atas bantuan hukum dan pengaturan lebih lanjut jaminan hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam UUD.

Angka pelanggaran hak individu dalam proses hukum yang masih tinggi dan cenderung meningkat, termasuk paska pengesahan UU Bantuan Hukum ini membutuhkan pemberian bantuan hukum baik melalui sistem bantuan hukum yang dikelola oleh pemerintah maupun melalui mekanisme lain. Pelaksanaan bantuan hukum melalui program bantuan hukum pemerintah masih memiliki keterbatasan sehingga belum dapat menjamin penghormatan terhadap hak-hak individu atau mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam proses hukum baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.

Potensi penerima bantuan hukum jumlahnya sangat besar, namun sistem bantuan hukum yang dijalankan saat ini belum sesuai dengan kebutuhan riil terhadap bantuan hukum. Proses yang terjadi pada awal implementasi bantuan hukum ini terlihat sebagai pemenuhan kewajiban pemerintah yang sudah ditentukan oleh undang-undang tanpa mempertimbangkan efektivitas

dan kualitas implementasinya. Salah satu persoalan mendasar mengenai pengaturan kelembagaan pengelolaan bantuan hukum adalah adanya sentralisasi peran dan kewenangan ke dalam satu lembaga dalam mengatur, mengelola dan mengawasi implementasi bantuan hukum berpotensi menimbulkan kelemahan sistem bantuan hukum dan penyalahgunaan atau penyimpangan kewenangan. .

Implementasi bantuan hukum sesuai dengan UU Bantuan Hukum pada tahun awal ini telah menciptakan kondisi baru dalam pelaksanaan sistem bantuan hukum yaitu dengan hadirnya institusi negara melalui pendanaan. Relasi antara pemberi bantuan hukum dengan pemerintah ini berimplikasi pada prosedur administrasi yang harus dijalani oleh organisasi pemberi bantuan hukum. Pada beberapa kondisi, pemenuhan persyaratan administrasi ini menyulitkan organisasi pemberi bantuan hukum. Sehingga menimbulkan keengganan lembaga untuk mengikuti program tersebut.³⁹

³⁹ Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Satrio Wirataru *Bantuan Hukum Masih Sulit diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-Undang no 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. (Jakarta: Kontras, PSHK, AIPJ, 2014) h. 69

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

1. Sejarah Ogan Komering Ulu Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 3.370 km² dengan Ibukota Kabupaten ini terletak di Martapura yang didiami penduduk dengan beragam multi etnis suku dengan penduduk asli suku komering, kemudian ada suku Jawa, Ogan, Bali dan sejumlah suku lainnya yang ada di Nusantara meskipun demikian kehidupan rukun penuh kekerabatan yang sangat kental.¹

Pada awal berdirinya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri dari atas 10 Kecamatan, 199 Desa dan 3 Kelurahan dan saat ini OKU Timur sudah ada 20 kecamatan, 305 desa, 7 kelurahan dan 20 desa persiapan. Secara historis pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah pengulangan bentuk pembagian wilayah Pemerintahan yang pernah ada dan berlaku sebelumnya yang dikenal sebagai pemerintahan Afdeling (Kabupaten) Ogan dan Komering Ulu pada tahun 1918 dengan Ibu Kota Muaradua yang kemudian dipindahkan ke Baturaja.

¹ Sejarah singkat oku timur <http://www.okutimurkab.go.id/peta-wilayah> diakses tanggal 15 agustus 2019 pukul 06:09

Pada tahun 1947 daerah tersebut ditetapkan menjadi daerah otonom yang meliputi 3 Onder Afdeling, yaitu :

1. Onder Afdeling Ogan Komering Ulu dengan Ibukota Baturaja
2. Onder Afdeling Komering Ulu dengan Ibukota Martapura
3. Onder Afdeling Makakau dan Ranau dengan ibukotanya Muaradua

Pada tahun 1950 terjadi pembubaran Nomor 11 Tahun 1950. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1959 kembali dibentuk Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Ibukotanya Baturaja. Setelah 15 Tahun berjalan sistem pemerintahan mengalami perubahan yang sangat mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menghapuskan sistem pemerintahan Marga.

Perjalanan sejarah tersebut menggambarkan bahwa pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berkaitan erat dan tidak terlepas dari latar belakang sejarah sistem pembagian wilayah pemerintahan yang pernah ada dan berlaku sebelumnya di masa lampau. Peneliti rencana penetapan Kabupaten dan Kota Administratif menjadi Kotamadya dalam Propinsi Sumatera Selatan. Untuk mewujudkan keinginan tersebut maka pada tanggal 15 Agustus Tahun 2001 dibentuk panitia pembantu persiapan pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan ketua H.A.Rasyid Yusuf dan kawan-kawan.

Di daerah rencana pemekaran sebagai klimaks perjuangan PPP-KOT dan seluruh elemen masyarakat membuahkan hasil yaitu dengan

terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan ditetapkannya UU Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan.

Tanggal 17 Januari 2004 Gubernur Sumatera Selatan melantik Drs. Amri Iskandar sebagai pejabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan telah meletakkan kerangka awal dari penataan kelembagaan dan dimulai jalannya roda Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dilanjutkan oleh Drs.Sujiadi,MM sebagai pejabat Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang definitive. Pada awal berdirinya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri dari atas 10 Kecamatan, 199 Desa dan 3 Kelurahan, dan saat ini OKU Timur sudah ada 20 kecamatan, 305 desa, 7 kelurahan dan 20 desa persiapan.

2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Martapura Ogan Komering Ulu Timur

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa “Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan UndangUndang ini”.² Pelaksanaan oleh Menteri memiliki makna yang sama dengan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan jika dilihat dari sumber kewenangan, kewenangan ini berasal dari kewenangan atribusi. mengatur pendelegasian

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pasal 6

pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum untuk diatur dalam Perda.³

Pengalokasian anggaran dari APBD ini merupakan jalan bagi keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum. Meskipun demikian, pada dasarnya kewenangan penyelenggaraan Bantuan Hukum masih belum diatur secara jelas dalam pembagian urusan pusat dan daerah yang diatur dalam lampiran UU Pemda.⁴

Jika dilihat dari sistem/pola kerja penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka Bantuan Hukum masuk pada ciri-ciri kewenangan absolut pemerintah pusat. Hal ini diperkuat bahwa pelaksanaan bantuan hukum ini dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Hukum dan HAM cq BPHN) atau dilimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM) atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Dalam menjalankan fungsinya terhadap penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Pusat (Menteri) memiliki tugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;

³ Tim Penulis Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Dalam Negeri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Yayasan TIFA, *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah*, (Jakarta, 2018), h. 4

⁴ *Ibid.*, h. 6

- d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran ⁵ dan memiliki kewenangan meliputi:

- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum
- b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum ⁶

Tetapi karena adanya kewenangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dengan APBD sehingga pemerintah daerah memiliki peran dalam pelaksanaan bantuan hukum yang menggunakan anggaran dari APBD. Hal ini pun diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dalam butir 26, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Selain mengatur akan kewenangan Pemerintahan Pusat, UU Bantuan Hukum dalam Pasal 19 menjelaskan bahwa Daerah dapat mengalokasikan

⁵ *Ibid.*, h 10

⁶ *Ibid.*,

anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Rencana pembangunan nasional maupun agenda pembangunan global melihat bahwa *rule of law* dan akses terhadap keadilan memiliki peran instrumental dalam pencapaian tujuan nasional yang diamanatkan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁷

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari jaminan negara atas hak bantuan hukum sebagai bagian dari akses terhadap keadilan, khususnya untuk kelompok miskin dan marjinal.⁸

Meskipun penyelenggaraan bantuan hukum dimandatkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga membuka ruang penganggaran bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran bantuan hukum melalui APBD, maka

⁷ Julius Ibrani, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, (Jakarta: YLBHI, 2013), h. 90.

⁸ *Ibid.*,

pemerintah daerah juga memiliki peran dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang menggunakan anggaran dari APBD tersebut.

Urusan pemerintah pusat dan daerah sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, dengan presiden sebagai pemegang tanggung jawab akhir. Oleh karena negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, maka tanggung jawab ini melekat pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam program bantuan hukum ini memerlukan pengaturan mengenai pembagian peran dalam hal penyelenggaraan dan penganggaran bantuan hukum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Di samping itu, berbagai inisiatif yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan layanan bantuan hukum juga memerlukan pengaturan dan sinkronisasi agar tercipta tertib hukum dan administrasi demi bantuan hukum yang berkualitas, serta sejalan dengan strategi nasional akses terhadap keadilan.⁹

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013

B. Bantuan Hukum Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu No 2 Tahun 2013

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 Mengenai Bantuan Hukum Cuma-Cuma atas dasar pertimbangan:

1. dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi orang miskin di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sekaligus wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam mewujudkan akses terhadap keadilan sesuai prinsip kesamaan di muka hukum.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum di dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:¹⁰

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak constitutional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di kabupaten ogan komering ulu timur.

Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Meliputi masalah hukum keperdataan, pidana,

¹⁰ Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Pasal 3

dan tata usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum yang dimaksud meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Syarat dari pemberi bantuan hukum meliputi berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum¹¹. Sedangkan syarat penerima bantuan hukum meliputi, mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh dua orang tokoh masyarakat setempat.¹²

Tata cara pemberian bantuan hukum oleh pemerintah daerah kabupaten ogan komering ulu timur:

1. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
2. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.

¹¹ Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Pasal 8

¹² Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Pasal 14

3. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum
4. Dalam permohonan bantuan hukum ditolak, pembri bantuan hukum memberitahukan secara tertulis dan mencantumkan alasan penolakan kepada calon penerima bantuan hukum.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan perarturan bupati.¹³

C. Implementasi Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Kota Martapura

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah upaya dalam memenuhi tanggung jawab negara sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap warga negara untuk memiliki kedudukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam hal ini, lahirlah UU Bantuan Hukum yang didalamnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari asas otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di mana kewenangan urusan konkuren pemerintah daerah yang lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak serta sumber dayanya melihat dari efisiensi daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing Daerah.¹⁴

¹³ Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Pasal 15

¹⁴ Julius Ibrani, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberih.* 10

Dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan bantuan hukum tersebut maka pemerintahan oku timur pada tanggal 27 juni 2013 pemerintah daerah oku timur menetapkan Perarturan Daerah Ogan Komerling Ulu Timur tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma dimana dimaksudkan agar dengan adanya perda tersebut masyarakat OKU Timur khususnya masyarakat miskin atau kurang mampu dapat mencari keadilan, dalam artian dapat dibela hak-haknya sebagai manusia.¹⁵

Sehubungan dengan skema alur pengajuan permohonan bantuan hukum, mekanisme permohonan dibedakan dengan dua pola pelaksanaannya, yaitu pola kelembagaan dan pola personal. Dalam pola kelembagaan, seorang pemohon harus mengajukan permohonannya pada lembaga yang bekerjasama dengan pemerintah daerah (di bawah biro hukum setempat), seperti LBH atau organisasi penyedia bantuan hukum ditingkat lokal, untuk diidentifikasi, diverifikasi dan ditindaklanjuti. Pengajuan permohonan kepada lembaga ini bisa disebut sebagai pintu pertama. Selanjutnya, lembaga terkait mengajukan berkas permohonan dari pemohon kepada pemerintah daerah melalui biro hukum, sebagai pelaksana program bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Pengajuan permohonan bantuan lembaga sipil penyedia bantuan hukum kepada pemerintah daerah ini disebut sebagai pintu kedua. Setelah verifikasi selesai, lembaga penyedia bantuan hukum dapat memproses perkara pemohon, dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah daerah, sebagai bagian dari program atau kebijakan bantuan

¹⁵ Fajri Nuryadin , Wawancara Kasubbag Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan Setda Kabupaten Oku Timur, pada hari Selasa, 30 Juli 2019.

hukum. Sedangkan dalam pola pesonal, seorang pemohon hanya melalui satu pintu. Artinya seorang pemohon dapat mengajukan berkas permohonan bantuan hukum kepada pemerintah, tanpa harus melewati lembaga penyedia bantuan hukum. Proses inilah yang disebut proses satu pintu. Setelah melakukan proses identifikasi dan verifikasi permohonan, pemerintah daerah memproses permohonan perkara melalui tim yang sebelumnya sudah dibentuk melalui penunjukan oleh kepala daerah atau otoritas lokal yang berwenang.¹⁶

Menurut kasubag bagian hukum, ham dan ortala kabupaten okan komering ulu timur tersebut program bantuan hukum ini baru mulai berjalan pada tahun 2017. Dengan menggunakan mekanisme satu pintu dimana para pencari bantuan hukum mengajukan berkas langsung kepada pemerintah daerah, apabila permohonan berkas tersebut disetujui, barulah pemerintah daerah memberikan bantuan hukum melalui tim atau pengacara yang telah ditunjuk oleh pemerintah oku timur. Selain itu kendala yang sangat dirasakan dari awal berjalannya program tersebut sampai dengan saat ini adalah minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah oku timur untuk menjalankan program ini sehingga tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oku timur mengenai program bantuan hukum gratis ini.¹⁷

Tabel 1
Daftar permohonan bantuan hukum

No	No Register Perkara	Jenis Perkara	Advokat
1	4/Pdt.G/2017/PN.Bta	Hak asuh anak	Edison Dahlan, SH
2	1100/Pdt.G/2017/PA.Bta	Isbat Nikah	Edison Dahlan, SH

Sumber: Arsip pemerintah daerah OKU Timur bidang hukum 2017

¹⁶ Julius Ibrani, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*,.....h. 94.

¹⁷ Fajri Nuryadin, Wawancara Kasubbag Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan Setda Kabupaten Oku Timur, pada hari Selasa, 30 Juli 2019.

Tabel 2
Daftar permohonan bantuan hukum

No	No Register Perkara	Jenis Perkara	Advokat
1	6/Pdt.G/2017/PN.Bta	Perceraian	Joni Antoni, SH
2	10/Pdt.G/2017/PN.Bta	Perceraian	Rumsi, SH

Sumber: Arsip pemerintah daerah OKU Timur bidang hukum 2018

Dalam rangka memaksimalkan program bantuan hukum gratis bagi setiap warga tidak mampu pemerintah OKU Timur pada awal tahun 2019 melakukan kerjasama dengan Rumah Bantun Hukum Yayasan AFTA yang beralamatkan di jalan Raya Kota Baru Belitang Desa Pemetung Basuki Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering ulu Timur. Rumah bantuan Hukum AFTA yang berada di OKU Timur ini merupakan cabang dari Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA yang berada di Daerah Istimewa Jogjakarta dimana rumah bantuan hukum ini telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan adanya kerjasama tersebut maka Faik Rahmi,SH.,MH dan rekan selaku Direktur berkewajiban untuk memberikan bantuan Hukum secara gratis terhadap masyarakat miskin yang terjerat dalam masalah hukum. Sehingga PERDA tersebut dapat berjalan.¹⁸

Pemerintah Ogan Komering Ulu melaksanakan pola kelembagaan ini baru pada awal 2019 atau sejak bekerjasama dengan Rumah Bantuan Hukum yayasan AFTA. Sebelumnya pemerintah daerah melaksanakan program bantuan hukum dengan pola personal yaitu dengan sistem penunjukan advokat untuk memberikan bantuan hukum. Pemerintah menggunakan sistem

¹⁸ Fajri Nuryadin , Wawancara Kasubbag Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan Setda Kabupaten Oku Timur, pada hari Selasa, 30 Juli 2019.

penunjukan advokat ini dikarenakan masih minimnya lembaga bantuan hukum yang ada di daerah, khususnya di kabupaten Ogan Komering Ulu timur. Dan juga masih rendahnya permohonan bantuan hukum oleh masyarakat sehingga urgensi dalam melakukan kerjasama dengan kelembagaan rendah.¹⁹

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ogan komering ulu timur dan rumah bantuan hukum AFTA berupa bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Untuk bantuan litigasi pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau gugatan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.



Bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah ini tidak ditujukan untuk semua jenis perkara, ada perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diberikan bantuan hukum secara gratis walaupun pemohon adalah orang miskin atau orang yang tidak mampu. Perkara-perkara tersebut diantaranya adalah perkara narkoba dan pelecehan seksual. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Faik Rahmi selaku direktur dari Rumah Bantuan Hukum Yayasan Afta yang berada di kabupaten Ogan Komering ulu Timur ini. Dalam wawancara dengan faik rahmi ini diketahui bahwa selama periode tahun 2019 mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus sudah ada 6 perkara yang di tangani oleh Faik rahmi dan rekan.²⁰

¹⁹ Fajri Nuryadin , Wawancara Kasubbag Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan Setda Kabupaten Oku Timur, pada hari Selasa, 30 Juli 2019.

²⁰ Faik Rahmi, wawancara direktur Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA cabang Ogan Komering Ulu Timur 18 September 2019

Tabel 3
Daftar permohonan bantuan hukum

no	No. Register perkara	Jenis perkara	advokat
1	111/Pdt.G/2019/PA.mpr	Cerai Gugat	Faik Rahmi, SH
2	84/Pdt.G/2019/PA.mpr	Cerai Gugat	Saiful Mizan, SH
3	80/Pdt.G/2019/PA.mpr	Cerai Gugat	Faik Rahmi,SH.,MH
4	106/Pdt.G/2019/PA.mpr	Cerai Gugat	Faik Rahmi,SH.,MH
5	447/Pdt.G/2019/PA.mpr	Cerai Talak	Arpian, SH
6	16/Pdt.G/2019/PN.Bta	Perceraian	Fitra Indalah, SH

Sumber: Arsip pemerintah daerah OKU Timur bidang hukum 2019

Dalam wawancaranya juga Faik Rahmi mengaku berinisiatif untuk mengajukan kerjasama dengan Pemerintah Ogan komering Ulu Timur dalam hal program bantuan hukum gratis dikarenakan dua faktor. Pertama, wilayah Ogan Komering Ulu Timur telah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai bantuan hukum gratis. Kedua, berkaitan dengan kewenangan relatif dari sebuah lembaga pengadilan, dimana terhitung dari oktober 2018 berdirinya Pengadilan Agama Martapura maka secara otomatis Pengadilan Agama Baturaja tidak memiliki wewenang terhadap perkara yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dimana sebelumnya dia telah melakukan kerjasama lebih dahulu dengan Pengadilan Agama Baturaja dalam mengelola posbakum.²¹

Dengan memanfaatkan peraturan Daerah tersebut maka Rumah Bantuan Hukum AFTA dapat melanjutkan pemberian jasa bantuan hukum gratis kepada masyarakat Ogan Komering Ulu Timur yang sebelumnya dilakukan di Pengadilan Agama Baturaja melalui Posbakum.

²¹ Faik Rahmi, wawancara direktur Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA cabang Ogan Komering Ulu Timur 18 September 2019

Dalam mekanisme pendanaan berbeda antara program bantuan hukum yang berada di Pengadilan dengan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu Timur. Dalam Lembaga Pengadilan anggaran dibebankan kepada DIPA sedangkan program pemerintah dibebankan kepada APBD. Dana yang diberikan oleh pemerintah untuk program bantuan hukum litigasi maupun non litigasi. Namun untuk sekarang hanya bantuan litigasi yang berjalan. Dalam pendanaan tersebut sudah termasuk biaya perkara pemohon, sehingga pemohon tidak lagi mengeluarkan biaya untuk proses peradilan. Pencairan dana untuk program bantuan hukum tersebut dilakukan dengan sistem *reimbursement* yang dilakukan setiap 6 bulan sekali.²²

Ici Marantika selaku pemohon bantuan hukum mengatakan bahwa dia tidak mengeluarkan biaya apapun dalam proses persidangan. Yang dia keluarkan hanya berupa ongkos pribadi untuk datang ke Pengadilan ketika sidang. Dia juga mengatakan kalau ia mengetahui adanya program bantuan Hukum gratis ini dari anak saudaranya yang kebetulan berkuliah jurusan hukum sehingga mengetahui adanya program seperti ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu seperti dia dalam menghadapi kasus hukum.²³

²² Faik Rahmi, wawancara direktur Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA cabang Ogan Komering Ulu Timur 18 September 2019

²³ Ici Marantika, wawancara salah satu pemohon bantuan hukum di Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA tanggal 20 september 2019

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Cuma-cuma di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pemberian bantuan hukum secara implementasi di masyarakat terdapat suatu kejanggalan yang pada akhirnya menyebabkan suatu persoalan-persoalan pada penerapannya sehingga akibatnya tidak terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa persoalan yang menghambat penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Yaitu:

1. Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai Peraturan daerah tentang bantuan hukum Cuma-Cuma

Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*). Perspektif tersebut secara ideal dapat menyelesaikan suatu persoalan ini, akan tetapi hal itu belum sesuai dalam tataran implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat masih banyak yang buta terhadap hukum dan

tidak adanya sosialisasi oleh Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengenai adanya program bantuan hukum secara gratis.¹

Belum adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pengetahuan terhadap produk hukum seperti Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau bersikap apatis terhadap hukum dan segala jenis layanan hukum termasuk dengan layanan bantuan hukum secara gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Masyarakat ini masih mengikuti stereotip bahwa bantuan hukum atau yang lebih umum dikenal oleh masyarakat dengan istilah pengacara itu hanya untuk mereka yang memiliki uang, sedangkan untuk mereka yang tidak mampu dirasa mustahil untuk didampingi oleh pengacara saat mereka terjerat dalam sebuah perkara.

Pemikiran lain yang berkembang dimasyarakat dimana semua pelayanan yang bersifat gratis maka pelayanannya tidak akan mereka dapatkan secara maksimal, sehingga sebagian dari mereka yang sudah mengetahui program pemerintah mengenai bantuan hukum secara gratis pun tidak ingin memakai jasa layanan tersebut karena dianggap pelayanannya akan asal-asalan. Dan putusan dalam perkara yang mereka hadapi tidak akan sesuai dengan harapan mereka.

¹ Fajri Nuryadin , Wawancara Kasubbag Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan Setda Kabupaten Oku Timur, pada hari Selasa, 30 Juli 2019.

2. Minimnya Anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk program bantuan hukum Cuma-Cuma

. Alokasi pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pemberi bantuan hukum diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH01.HN.03.03 Tahun 2015 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, maksimum biaya litigasi untuk kasus pidana dan Peraturan Daerah adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sementara untuk kegiatan non litigasi seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, dll, biayanya bervariasi mulai dari Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), hingga Rp. 3.740.000 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).²

Berdasarkan keputusan menteri tersebut, anggaran sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta) yang disiapkan oleh pemerintah daerah Ogan Komering Ulu Timur³ hanya bisa diberikan untuk sepuluh perkara, hal tersebut jelas jauh dari kata cukup jika kita bandingkan dengan perkara yang masuk di pengadilan. Terhitung selama tahun 2019 perkara yang masuk ke pengadilan agama ada 600 lebih perkara.⁴

² Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

³ Fajri Nuryadin, Wawancara Kasubbag Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan Setda Kabupaten Oku Timur, pada hari Selasa, 30 Juli 2019

⁴ Bahder Johan, wawancara Panitera Pengadilan Martapura, pada hari Senin 5 Agustus 2019

3. Pembatasan layanan perkara

Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah harus mencakup semua jenis kasus serta kompetensi peradilan, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, dan uji materil di Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi termasuk hubungan industrial, niaga, dan agama, baik litigasi maupun nonlitigasi.

Namun Pemerintah Ogan Komering Ulu Timur memberikan ketentuan terhadap perkara yang dapat diberikan bantuan hukum. Perkara yang dapat diberikan bantuan hukum adalah perkara yang tidak terkait dengan perbuatan Asusila, Narkoba, dan Korupsi. Selain itu juga pemberian bantuan hukum tersebut hanya sampai pada pengadilan tingkat satu. Untuk perkara yang mengajukan banding dan kasasi tidak lagi mendapatkan bantuan hukum tersebut.

4. Minimnya lembaga bantuan hukum

Pemberian layanan bantuan hukum pada UU Bantuan Hukum tidak dilakukan langsung oleh pemerintah. Bantuan hukum tersebut diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum atau disebut dengan Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Agar dapat disebut PBH, suatu organisasi bantuan hukum harus mengikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila OBH tersebut berhasil memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan selama proses verifikasi, maka pemerintah akan menyatakan OBH tersebut lulus verifikasi dan ditentukan nilai akreditasinya. OBH

yang sudah terakreditasi dapat dianggap sebagai PBH dan dapat memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan UU Bantuan Hukum.

Berdasarkan hasil verifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh kementerian hukum dan HAM pada tahun 2018, hanya terdapat 524 organisasi bantuan hukum yang dinyatakan lolos verifikasi.⁵ Sedangkan untuk wilayah Sumatera Selatan hanya ada 10 organisasi yang lolos. Angka tersebut sangatlah kecil jika dibandingkan dengan masyarakat yang berada di provinsi sumatera selatan.

B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Ten tang Bantuan Hukum

1. Analisis Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum telah di fokuskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum beserta turunannya (PP No. 42 Tahun 2013, PERMEN No. 3 Tahun 2013, PERMEN No. 22 Tahun 2013) dimana peraturan tersebut mendukung pelaksanaan bantuan hukum untuk orang atau kelompok orang miskin, aturan tersebut menyangkut ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan dan standar pelaksanaan, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban, syarat dan tata cara, pendanaan, larangan dan sanksi. Semua peraturan mengenai bantuan hukum sebelum undang-undang bantuan hukum diundangkan, masih dapat berlaku asal tidak bertentangan.

⁵ Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 S.d. 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 merupakan wujud dari keikutsertaan Pemerintah Ogan Komering Ulu Timur terhadap program Pemerintah Pusat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Dalam peraturan Daerah OKU Timur No 2 Tahun 2013 pasal 10 mengenai kewajiban pemberi bantuan hukum poin c disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum, dalam hal ini merupakan Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada penerima bantuan bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan daerah kecuali ada alasan yang sah secara hukum. Namun ternyata dalam pelaksanaan bertentangan dengan apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah dimana perkara yang berkaitan dengan asusila pun berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan asas keadilan dan persamaan kedudukan di dalam hukum yang tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Bantuan Hukum

2. Analisis Hukum Islam

Ajaran Islam tentang penataan hukum, memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penataan hukum menurut perspektif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu al-quran. Ia merupakan hukum normatif bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan, ras, politik dan sosial budaya. Keuniversalan hukum Al-Qur'an

itu memerlukan penjelasan dalam bentuk implementasi hukum yang bersifat praktis. Hal ini dilakukan Rasulullah melalui kehidupan sehari-hari, dalam bentuk hukum normatif bersifat aplikatif, yaitu As-sunnah. Manakala terjadi ketiadaan atau kejelasan hukum yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka pembentukan hukumnya diserahkan kepada manusia, melalui metode ijtihad.

Para ulama mazhab memposisikan pemberi bantuan hukum itu sejajar dengan penegak hukum yaitu hakim. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Advokat setara dengan penegak hukum lainnya. Namun para ulama mazhab lebih menekankan pada ketatnya kualitas untuk merekrut seorang penegak hukum dan juga pengawasan terhadap kinerja para penegak hukum yang kini dirasa kurang

Di dalam Al-Quran sendiri tidak terdapat istilah tentang bantuan hukum dalam perkara pidana. Pada kajian kitab-kitab fiqh banyak yang menyinggung soal peradilan (*al-qadha*), akan tetapi materinya tidak menyinggung tentang bantuan hukum. Pada hakekatnya yang menjadi dasar dalam penerapan bantuan hukum adalah prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri, salah satunya yakni prinsip keadilan dan persamaan. Di dalam Al-Qur'an, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu, keadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan.

Bantuan hukum sebagai salah satu perwujudan dari tercapainya peradilan yang adil dan tidak memihak. Masalah tentang keadilan ini juga

terdapat dalam petikan surat Umar Bin Khattab kepada Abdullah bin Qais atau Abu Musa Al-Asy'ari tentang masalah peradilan, disebutkan: “Sesungguhnya peradilan itu adalah fardhu yang dikukuhkan dan sunnah yang harus diikuti. Lalu, pahamiilah bila peradilan dibebankan padamu, karena sesungguhnya tiada bermanfaat membicarakan kebenaran tanpa melaksanakannya. Samakan hak semua orang dihadapanmu, di dalam pengadilanmu dan di dalam majlismu sehingga orang yang terpandang tidak menginginkan kecenderunganmu kepadanya dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu...”

Esensi Keberadaan Advokat menurut Hukum Islam. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan bantuan hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan berdasarkan undang-undang. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Advokat mempunyai tugas-tugas yang beragam, baik melayani seseorang dalam memecahkan masalahnya, memelihara hak-hak orang yang dirampas haknya atau hanya sekedar memberikan saran. Islam memberikan atensi yang tinggi dalam masalah hukum, begitu pun terhadap status dan kewenangan kuasa atau wakil. Penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Islam mensyariatkan *wakâlah* karena manusia membutuhkannya.

Pandangan Islam tentang kedudukan advokat di Indonesia seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa ulama mazhab telah memposisikan pemberi bantuan hukum sejajar dengan penegak hukum yaitu hakim. Hal ini sesuai dengan undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 5 yang menyatakan bahwa kedudukan advokat setara dengan penegak hukum lainnya. Namun para ulama mazhab lebih menekankan pada ketatnya kualitas untuk merekrut seorang penegak hukum dan juga pengawasan terhadap kinerja para penegak hukum yang dirasa kurang saat ini di Indonesia khususnya Advokat.

Kedudukan advokat yang sekarang ini semakin kuat ternyata tidak sepenuhnya berkontribusi positif dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Tidak sedikit praktik yang dilakukan oleh para advokat hitam yang seolah mereka mendapat angin segar untuk melakukan praktek mafia hukum di Negara ini. Advokat makin semena-mena dan menyelewengkan pekerjaan yang mulia tersebut hanya untuk mendapat keuntungan secara pribadi. Bahkan tak jarang advokat menjadi otak dari tindakan melawan hukum yang dilakukan kliennya.

Namun disisi lain keberadaan advokat sangat diperlukan, karena advokat sebagai profesi yang mulia ini dapat memberikan advokasi dan bantuan terhadap masyarakat awam yang hendak mencari keadilan. Advokat sebagai pihak yang independen diluar dari lembaga negara bisa membantu mengawasi proses peradilan di Indonesia sehingga tidak terjadi penyelewengan dan tindakan semena-mena oleh pemerintah.

Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif dalam pembahasan mengenai bantuan hukum ini tidak terlepas dari asas keadilan dan persamaan. Dimana pemberian bantuan hukum ini sudah seharusnya didapatkan oleh semua orang yang berhak. Namun yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan dari peraturan daerah Ogan Komering Ulu Timur mengenai bantuan hukum Cuma-Cuma yang diberikan kepada orang tidak mampu tidak sesuai dengan asas keadilan dan persamaan. Karena adanya pembatasan perkara yang dilakukan oleh pemerintah Ogan Komering Ulu Timur, seperti perkara yang berkaitan dengan asusila dan narkoba. Sehingga tidak semua perkara dapat diberikan bantuan hukum gratis walaupun pemohon tersebut adalah orang tidak mampu. Dan juga ada Asas praduga tidak bersalah sejalan dengan kaidah fiqh lainnya yang mengatakan (*al-asl bara'ah az-zimmah*) yaitu pada dasarnya manusia terbebas dari tanggungan atau tuntutan. Cara seperti ini termasuk dalam pesan Rasulullah SAW yang mengatakan “ siapa yang membantu orang lain keluar dari kesulitan yang dihadapinya, maka Allah akan memberikan pula kelapangan baginya di hari kiamat nanti” HR Muslim. Disini kuasa hukum bekerja membantu meringankan hukuman terdaakwa sesuai dengan kesalahannya, bukan membantu agar ia terbebas dari kesalahannya.⁶

⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ...h. 984

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kota Martapura kabupaten Ogan Komering Ulu Timur belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya belum adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bantuan hukum secara gratis sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya program bantuan hukum tersebut, minimnya anggaran yang disediakan untuk program bantuan hukum sehingga tidak dapat mengcover seluruh perkara yang memerlukan bantuan hukum, adanya pembatasan pelayanan dengan adanya perkara-perkara tertentu yang tidak bisa diberikan bantuan hukum, minimnya lembaga bantuan hukum serta jauhnya akses menempuh lembaga bantuan hukum sehingga tidak efektif untuk masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum.
2. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif dalam pembahasan mengenai bantuan hukum ini tidak terlepas dari asas keadilan dan persamaan. Dimana pemberian bantuan hukum ini sudah seharusnya didapatkan oleh semua orang yang berhak. Namun yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan dari peraturan daerah Ogan Komering Ulu Timur mengenai bantuan hukum Cuma-Cuma yang diberikan kepada orang tidak mampu tidak sesuai dengan asas keadilan dan persamaan. Karena adanya pembatasan perkara yang dilakukan oleh pemerintah Ogan Komering Ulu

Timur, seperti perkara yang berkaitan dengan asusila dan narkoba. sehingga tidak semua perkara dapat diberikan bantuan hukum gratis walaupun pemohon tersebut adalah orang tidak mampu.

B. Rekomendasi

1. Perlu dilakukan upaya untuk melakukan penyempurnaan dalam bentuk revisi atau pembentukan peraturan yang belum ada terhadap ketentuan teknis sistem bantuan hukum. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi riil yang ada di daerah dengan memperhatikan kapasitas kelompok penerima bantuan hukum dan organisasi pemberi bantuan hukum;
2. Perlu dilakukan upaya koordinasi antara pengelola program bantuan hukum dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri untuk meningkatkan pemahaman dan mendukung implementasi bantuan hukum yang sudah diatur dalam UU Bantuan Hukum;
3. Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan pengelola bantuan hukum perlu melakukan program untuk mendorong keberadaan organisasi pemberi bantuan hukum di daerahdaerah yang masih belum terdapat atau masih sedikit organisasi pemberi bantuan hukum. Hal ini untuk memperluas akses terhadap bantuan hokum oleh masyarakat;
4. Perlu meninjau kembali penerapan besaran dana bantuan hukum dengan mempertimbangkan besaran dana secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika. 2011.
- Alwi, Hasan dan Sugono, Dendi. *Telaah Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2002.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sy9ma. 2009.
- Harianto, Aries dan Sunggono, Bambang, *bantuan hukum dan hak asasi manusia*, Bandung: CV. Mandarmaju, 1994.
- Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: Mutiara Sumber Widya. 2002.
- Kusnadi, Didi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta. 2015.
- Indrati, Maria Farida S. *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Mukianto, Jandi, *Prinsip dan praktek bantuan hukum di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017
- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Radial. *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih sunnah 13-terjemahan*, Bandung: Alma'arif, 1987, h. 55.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.
- Susiadi, *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.

Shiddieqy, T.M Hasby Ash, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997

Tim Penulis Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Dalam Negeri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Yayasan TIFA, *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah*, Jakarta:LBHI Yayasan TIFA 2018

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiadi. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Winarta, Frans Hendra, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo : Jakarta, 2000.

-----, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 462.

Dewanti, Yolanda putri, “implementasi bantuan hukum oleh komisi nasional perlindungan anak kepada anak sebagai korban tindak pidana” skripsi program S1 Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013.

jurnal

Afandi, Fachrizal, “implementasi pengabdian masyarakat berbasis Access to justice pada lembaga bantuan hukum kampus negeri pasca pemberlakuan undang-undang bantuan hukum” *rechtsvinding* vol 2 no 1 2013, (depok: fakultas hukum universitas brawijaya, 2013), h. 41. (on-line) tersedia di <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTIKEL%203%20Vol%202%20No%201.pdf> (20 agustus 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

Pujiarto, Iwan Wahyu et. Al. “*Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dikaitkan dengan undang-undang no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum*” *arena hukum* volume 8 nomor 3 tahun 2015 (fakultas hukum universitas Brawijaya), h. (on-line), tersedia di <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/208> dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

Saifuddin. “*Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*” *Al-‘Adalah* vol 14 no 2 2017, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. (on-line), tersedia di **Error! Hyperlink reference not valid.** (21 Agustus 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Online

Sejarah singkat oku timur <http://www.okutimurkab.go.id/peta-wilayah> diakses tanggal 15 agustus 2019 pukul 06:09

Undang-Undang

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

Wawancara

Bahder Johan, wawancara Panitera Pengadilan Martapura, pada hari Senin 5 Agustus 2019

Faik Rahmi, wawancara direktur Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA cabang Ogan Komering Ulu Timur 18 September 2019

Fajri Nuryadin, Wawancara Kasubbag Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan Setda Kabupaten Oku Timur, pada hari Selasa, 30 Juli 2019.

Ici Marantika, wawancara salah satu pemohon bantuan hukum di Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA tanggal 20 september 2019